



8/11-18

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 19 /DPR RI/I/2018-2019

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6A/DPR RI/II/2014-2015;
- c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;

d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

Memperhatikan

: Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 31 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDJ Perjuangan, FPG, FPD, FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, F-PGERINDRA, FPN Demokrat dan F-PHANURA;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA,


H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR/KOMISI II	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR/KOMISI III	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/KOMISI VI	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/KOMISI VIII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
6.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
8.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
9.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
10.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
11.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR/KOMISI X	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
12.	RUU tentang Kebidanan.	DPR/KOMISI IX	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
14.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
15.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/KOMISI VII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
17.	RUU tentang Sumber Daya Air.	DPR/KOMISI V	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
18.	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
19.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
20.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.			
21.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
22.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
24.	RUU tentang Bea Meterai.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
25.	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
26.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
27.	RUU tentang Daerah Kepulauan.	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
28.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/KOMISI VI	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
29.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR/ANGGOTA	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
30.	RUU tentang Pekerja Sosial.	DPR/KOMISI VIII	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
31.	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
32.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
33.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
35.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
36.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
37.	RUU tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/KOMISI VII	Menunggu Paripurna Penetapan Menjadi RUU Usul Inisiatif DPR	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
40.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR/ANGGOTA	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
41.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
42.	RUU tentang Penyardapan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
43.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR/KOMISI IX	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
44.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DPR/KOMISI V	Penyusunan	RUU Usulan Baru
45.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/KOMISI VII	Penyusunan	RUU Usulan Baru
46.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
48.	RUU tentang Permusikan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
49.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
50.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
51.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
52.	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
53.	RUU tentang Data Pribadi.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
54.	RUU tentang Wabah.	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
55.	RUU tentang Bahasa Daerah.	DPD	Penyusunan	RUU Usulan Baru

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

KETUA,



H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/PEMERINTAH	
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/PEMERINTAH	
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 19 Tahun 2016
4	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.	DPR	
5	RUU tentang Rahasia Negara.	DPR/PEMERINTAH	
6	RUU tentang Keamanan Nasional.	DPR/PEMERINTAH	
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR	
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR	
9	RUU tentang Konvergensi Telematika.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH	
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	PEMERINTAH	
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR	
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.	PEMERINTAH	
14	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD	
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	
17	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH	
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 8 Tahun 2015
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 9 Tahun 2015
20	RUU tentang Pemilihan Umum.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 7 Tahun 2017
21	RUU tentang Pertanahan.	DPR	
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No: 2 Tahun 2018
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.	DPR/DPD	
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/PEMERINTAH	
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	DPD	
27	RUU tentang Provinsi Bali.	DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan.	DPR	
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD	
30	RUU tentang Daerah Kepulauan.	DPD	
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR	
32	RUU tentang Perkumpulan.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana.	DPR	
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/PEMERINTAH	
36	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	PEMERINTAH/DPD	
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR/PEMERINTAH	
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	DPR	
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR/PEMERINTAH	
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	DPR	
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	
42	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/DPD	
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No: 5 Tahun 2018
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	PEMERINTAH	
45	RUU tentang Mahkamah Agung.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
46	RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No: 20 Tahun 2016
47	RUU tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).	PEMERINTAH	
49	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 13 Tahun 2016
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.	PEMERINTAH	
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	
52	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR	
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.	PEMERINTAH	
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	PEMERINTAH	
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana antar Negara.	PEMERINTAH	
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran.	PEMERINTAH	
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	PEMERINTAH	
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan.	PEMERINTAH	
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR	
60	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.	PEMERINTAH	
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (<i>Contempt of Court</i>).	DPR	
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR	
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
65	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR	
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR/DPD	
67	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/PEMERINTAH	
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 7 Tahun 2016
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia.	PEMERINTAH	
71	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.	DPR	
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/PEMERINTAH	
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR	
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR	
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan.	DPR	
76	RUU tentang Jalan.	DPR	
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 4 Tahun 2016
78	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 2 Tahun 2017
79	RUU tentang Arsitek.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 6 Tahun 2017

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR	
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan.	DPR	
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	DPR	
83	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR	
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR/DPD	
85	RUU tentang Perkoperasian.	PEMERINTAH	
86	RUU tentang Pertembakauan.	DPR	
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR	
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR	
89	RUU tentang Bahan Kimia.	PEMERINTAH	
90	RUU tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH	
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.	DPD	
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	PEMERINTAH	
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD	
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR	
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR	
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR	
97	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH	
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPR	
99	RUU tentang Geologi.	DPR/DPD	
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR	
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR	
104	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR	
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 8 Tahun 2016
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	DPR/DPD	
107	RUU tentang Kepalaangmerahan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No: 1 Tahun 2018
108	RUU tentang Pekerja Sosial.	DPR	
109	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.	DPR	
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga.	DPR	
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.	DPR/PEMERINTAH	
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	PEMERINTAH	
113	RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 18 Tahun 2017
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR	
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	DPR/DPD	
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR	
117	RUU tentang Kebidanan.	DPR	
118	RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No: 6 Tahun 2018

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	DPR	
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian.	DPR	
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR	
122	RUU tentang Wabah.	PEMERINTAH	
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	PEMERINTAH	
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.	DPR/PEMERINTAH	
125	RUU tentang Sistem Pengupahan.	DPR/PEMERINTAH	
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
127	RUU tentang Pemajuan Kebudayaan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 5 Tahun 2017
128	RUU tentang Bahasa Daerah.	DPD	
129	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 3 Tahun 2017
130	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR/DPD	
131	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR	
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	DPR/PEMERINTAH	
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/PEMERINTAH	
135	RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No: 9 Tahun 2018
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.	DPR/PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
137	RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 9 Tahun 2016
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	DPR/DPD	
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR	
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH	
141	RUU tentang Pajak Penghasilan.	PEMERINTAH/DPD	
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMERINTAH/DPD	
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH/DPD	
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH	
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	PEMERINTAH	
147	RUU tentang Lelang.	PEMERINTAH	
148	RUU tentang Penjaminan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 1 Tahun 2016
149	RUU tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH	
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	PEMERINTAH	
151	RUU tentang Penilai.	PEMERINTAH	
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	DPD	
153	RUU tentang Perekonomian Nasional.	DPR/DPD	
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.	PEMERINTAH	
156	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	PEMERINTAH	
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.	PEMERINTAH	
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR	
160	RUU tentang Tabungan Haji.	DPR	
161	RUU tentang Pengampunan pajak.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 11 Tahun 2016
162	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR	
163	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan.	DPR	
164	RUU tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH	
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	
166	RUU tentang Keamanan Laut.	DPR	
167	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR	
168	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	DPR	
169	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	
171	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR	
172	RUU tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
173	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH	
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH	
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD	
176	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
177	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR	
178	RUU tentang Sanitasi.	DPR	
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR	
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR	
182	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR	
183	RUU tentang Permusikan.	DPR	
184	RUU tentang Hak atas Tanah Adat.	DPD	
185	RUU tentang Penyadapan.	DPR	
186	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
187	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	
188	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR	
189	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

KETUA,


H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A